

**PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL PARIWISATA KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM Mendukung PARIWISATA BERKELANJUTAN
(STUDI KASUS: PANTAI GRAJAGAN BANYUWANGI)**

**STRENGTHENING SOCIAL TOURISM INSTITUTIONS IN BANYUWANGI
REGENCY IN SUPPORTING SUSTAINABLE TOURISM
(CASE STUDY: BANYUWANGI GRAJAGAN BEACH)**

Giyanto¹, Dini Noor Aini² Ikbal Zaenul Halim³
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: giyanto30041971@gmail.com
Email: dininooraini225@gmail.com

Abstrak

Pariwisata berkelanjutan dapat dicapai melalui penguatan kelembagaan sosial pariwisata dimana para pihak berkepentingan mulai dari aparatur desa hingga anggota masyarakat saling bersinergi. Langkah strategis dalam penguatan kelembagaan ini dilakukan dengan pemberian pelatihan, keterampilan dan kolaborasi yang sinergis sehingga Pantai wisata Grajagan di Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah wisata yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini melibatkan komponen kelembagaan sosial di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo. Kabupaten Banyuwangi, Evaluasi dan penguatan pemahaman akan peran-perannya aparatur pemerintah, kelompok penggerak PKK, Pokdarwis, kelompok pemuda, Duta Wisata, dan swasta terjadi saat diskusi interaktif setelah metode ceramah dilakukan. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan desa didorong guna menjadi pariwisata tetap berkelanjutan dan membawa masyarakat pada kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Pariwisata berkelanjutan; Kelembagaan sosial; Pemberdayaan masyarakat;

Abstract

Sustainable tourism can be achieved through strengthening social tourism institutions, where stakeholders, from village officials to community members, work together. Strategic steps in strengthening these institutions include providing training, skills development, and synergistic collaboration, enabling Grajagan Beach in Banyuwangi Regency to become a sustainable tourist destination and improve community welfare. This community service activity involved social institutional components in Grajagan Village, Purwoharjo District, Banyuwangi Regency. Evaluation and strengthening of understanding of the roles of government officials, the Family Welfare Movement (PKK), the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), youth groups, Tourism Ambassadors, and the private sector took place during an interactive discussion following the lecture. Enhancing the role and function of village institutions is encouraged to ensure sustainable tourism and contribute to community well-being.

Keywords: Sustainable tourism; Social institutions; Community empowerment

PENDAHULUAN

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pariwisata yang menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat serta penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) akan dapat meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Hal ini memberikan gambaran, bahwa kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi terus ditingkatkan karena potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Banyuwangi merupakan wilayah yang berada di ujung timur pulau Jawa, dan berbatasan langsung dengan selat Bali, Kabupaten ini mencakup berbagai destinasi yang meliputi keindahan alam dan keberagaman budaya lokal. Banyuwangi dikenal dengan wilayah yang memiliki potensi wisata pantainya dan menawarkan kuliner laut. Dilihat dari aspek budaya, Banyuwangi mempunyai kekayaan budaya lokal yang sangat menarik, seperti tari gandrung, janger dan lain-lain, mengingat hal ini semua, pembangunan pariwisata tentunya harus mengedepankan aspek keberlanjutan (*sustainable development*).

Wisata berkelanjutan menunjukkan adanya proses pengelolaan potensi pariwisata yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan pada aspek sosial dan budaya masyarakat lokal (Arasy et al., 2019). Tujuan dari pariwisata berkelanjutan ini tidak lain adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, masyarakat lokal, dan pelestarian lingkungan. Pada konsep ini interaksi sosial yang harmonis diantara semua pihak pemangku kepentingan dipertahankan, kemudian kepastian keadilan dari manfaat pariwisata yang bisa dirasakan oleh semua pihak serta tetap terjaganya kearifan lokal dan keseimbangan ekosistem.

Penguatan kelembagaan dibutuhkan untuk mencapai keberlanjutan, pengelolaan pariwisata dengan memberdayakan penduduk lokal, melestarikan budaya, serta memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam keberlanjutan pariwisata diwujudkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPKD) Banyuwangi 2025-2030 yang telah menjadi landasan

sinergitas para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang efektif.

Pariwisata yang berkelanjutan harus didukung oleh masyarakat setempat di mana akan melibatkan lembaga-lembaga sosial yang ada. Secara sosiologis lembaga-lembaga sosial melingkupi organisasi masyarakat dan perilaku yang diharapkan dapat mendukung program pariwisata berkelanjutan. Di sini organisasi dan perilaku dapat dibangun, diajarkan, dipelihara dan dipertahankan secara bersama-sama.

Penguatan kelembagaan sosial memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kelembagaan sosial, seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis), lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil, dapat menjadi wadah bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pariwisata di daerahnya (Nugroho, et al., 2016). Melalui kelembagaan sosial, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, mengembangkan kapasitas, dan membangun kemitraan dengan pemerintah serta pelaku usaha pariwisata untuk menciptakan iklim pariwisata yang kondusif (Muganda et al., 2013).

Penguatan kelembagaan sosial juga dapat mendorong terwujudnya pariwisata yang inklusif dan berpihak pada masyarakat lokal. Kelembagaan sosial berperan dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti melalui penyediaan lapangan kerja, peluang usaha, dan peningkatan pendapatan (Sutawa, 2012). Selain itu, kelembagaan sosial juga dapat menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian, promosi, dan pemanfaatan sumber daya pariwisata secara bertanggung jawab (Putra & Pitana, 2010).

Terkait dengan pembangunan wisata berkelanjutan di Banyuwangi, penguatan kelembagaan sosial diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan pariwisata. Melalui kelembagaan sosial yang kuat, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan keindahan objek wisata, menyediakan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan, serta mempromosikan potensi pariwisata daerah (Junaid,

2016). Kolaborasi antara kelembagaan sosial, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pariwisata juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan atraksi wisata yang unik dan berdaya saing (Haryanto, 2019). Dengan demikian, penguatan kelembagaan sosial merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat lokal.

METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Grajagan Kabupaten Banyuwangi ini merupakan kerjasama antara Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, dan mengundang beberapa pihak terkait seperti Aparatur Pemerintah Desa, Babinsa, Duta Wisata, Ibu PKK, dan anggota masyarakat. Penyampaian materi dalam bentuk ceramah secara interaktif dilakukan dan dilanjutkan dengan diskusi. Secara bertahap, penyampaian materi tentang penguatan kelembagaan desa bertujuan untuk menyamakan persepsi pihak-pihak yang bekerja sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Grajagan. Penguraian peran masing-masing pihak dan apa saja yang telah dilakukan selama ini menjadi bagian sebagai sharing praktek selama ini. Sehingga diskusi lebih difokuskan pada aspek yang bisa ditingkatkan guna lebih mendukung program pariwisata yang bisa mensejahterakan masyarakat setempat dan sekitarnya. Diskusi melibatkan para Duta Wisata Kabupaten Banyuwangi yang memiliki tugas mempromosikan wisata khususnya pantai di Desa Grajagan. Pada bagian diskusi ini juga para peserta mencoba mengevaluasi perilaku sosial yang dipandang dapat mendukung program pariwisata yang berkelanjutan.

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, serta merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya di destinasi wisata (Purnamasari, 2011). Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar pihak dalam pengembangan pariwisata (Nurhidayati, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

6. Peserta Kegiatan

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Abdurachman Saleh Situbondo adalah mereka yang telah terlibat dan mendukung Program Pariwisata selama ini, khususnya wisata bahari dan kuliner di sekitar Pantai Grajagan. Kegiatan yang berlangsung 1 (satu) hari dengan peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat sebagai berikut:

1. Aparatur Pemerintah Desa Grajagan, dalam kegiatan ini adalah para pegawai atau staf dalam pemerintahan desa. Para aparatur ini memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi administratif dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Aparatur pada umumnya bekerja untuk mendukung kepala desa dalam tugas-tugas seperti mengelola urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Secara struktur aparatur pemerintahan di desa meliputi: pertama, Kepala Desa yang menjadi pemimpin pemerintahan desa. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan desa, dan seorang kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa. Kedua adalah perangkat desa yang merujuk pada berbagai pejabat dan staf yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan seperti Sekretaris Desa yang bertanggung jawab atas administrasi umum di desa, termasuk dokumentasi dan keuangan; Kepala Urusan (Kaur) yang terdiri dari beberapa bidang, seperti urusan pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, keuangan, dan pembangunan. Kemudian perangkat desa berikutnya adalah Kepala Seksi (Kasi) yang bekerja pada berbagai bagian sesuai dengan tugas spesifik, seperti

pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kesejahteraan. Kepala dusun merupakan apatur desa yang memiliki tanggung jawab atas dusun yakni bagian dari desa. Kepala dusun juga bekerja untuk memastikan informasi dari kepala desa sampai kepada warga dusun. Adapun aparatur desa berikutnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD ini merupakan satu lembaga yang memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kebijakan yang diambil oleh kepala desa. BPD berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa dan dapat memberikan saran atau masukan kepada kepala desa. Para Aparatur desa ini, dalam konteks pariwisata bekerja secara bersama-sama dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa, pembangunan pariwisata, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga ketertiban dan ketentraman di desa. Oleh karena itu, kehadiran para aparatur desa pada kegiatan ini menjadi penting, selain sebagai mitra juga sebagai sumber informasi utama yang memperkaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Kelompok Ibu Penggerak PKK

Kelompok Ibu penggerak PKK adalah para ibu yang telah bergabung dalam organisasi PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga). Para ibu ini menjadi penggerak yang aktif dalam berbagai macam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Kegiatan PKK pada umumnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan kesehatan, ekonomi keluarga, lingkungan, dan sosial. Sebagai kelompok penggerak, para ibu ini sering kali menjadi ujung tombak dalam program-program pembangunan berbasis keluarga di tingkat desa atau kelurahan.

3. Duta Wisata

Duta Wisata pada umumnya dipilih dalam suatu ajang perlombaan yang diadakan Dinas Pariwisata di tingkat kabupaten. Pada kegiatan ini, 3 orang Duta Pariwisata terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan adalah pemenang dari Lomba Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Banyuwangi pada tahun lalu. Mereka ini berstatus pelajar dan

mahasiswi. Adapun peran para Duta Wisata ini adalah mewakili dan mempromosikan pariwisata daerah Banyuwangi.

7. Tahap Penyajian Materi

Penyajian materi dilakukan setelah Kepala Desa sebagai aparat pemerintah desa membuka secara resmi kegiatan pengabdian ini. Setelah itu disampaikan materi tentang kelembagaan desa yang mendukung pariwisata. Penyampaian materi juga sekaligus sebagai konfirmasi atas identifikasi peran para pemangku kepentingan pariwisata sebagai mana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Kelembagaan Desa dan Peranannya Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Wisata Pantai Grajagan

| Pelaku | Peranan | Komponen Utama Kelembagaan Desa | Peningkatan Kapasitas |
|-------------------|---|--|---|
| Pemerintah Daerah | Pembuat kebijakan, fasilitator | Kebijakan, dukungan finansial, dan | Pelatihan manajemen tata |
| | pengembangan infrastruktur | Infrastruktur | kelola pariwisata dan pengembangan kebijakan berkelanjutan |
| Masyarakat Lokal | Pemberdayaan keluarga dan masyarakat | Pengembangan SDM, ekonomi lokal, dan partisipasi | Pelatihan keterampilan usaha kecil, pengembangan kapasitas kewirausahaan, dan kesadaran lingkungan |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| Lembaga Adat dan Budaya | Pelestarian budaya lokal | Pelestarian budaya lokal | Pelatihan dokumentasi budaya dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan acara budaya |
| Komunitas Penggerak Pariwisata | Promotor dan edukator pariwisata lokal | Pokdarwis dan edukasi masyarakat | Pelatihan pemandu wisata, edukasi pariwisata berkelanjutan, dan pengelolaan atraksi lokal |
| Akademisi dan Peneliti | Penelitian dan panduan berbasis bukti | Penelitian dan panduan berbasis bukti | Pengembangan metodologi penelitian partisipatif dan pelatihan kolaborasi dengan masyarakat |
| Sektor Swasta | Pengelola usaha kecil dan kebersihan lingkungan | Investasi dan tanggung jawab sosial (CSR) | Pelatihan CSR berbasis pariwisata berkelanjutan dan investasi di komunitas lokal |
| Pemberdayaan dan Promosi | Pelaku gotong royong dan pembangunan fisik desa | Platform digital dan promosi pariwisata | Pelatihan pemasaran digital dan penggunaan platform online untuk promosi wisata |

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa peran dan fungsi kelembagaan sosial baik di desa maupun di luar desa, perseorangan maupun entitas dalam mendukung keberlanjutan pariwisata di Desa Grajagan. Secara internal aparatur desa seperti kepala desa berperan pada tingkat kebijakan di mana pariwisata di desanya

diatur agar bisa berjalan dengan baik. Peraturan desa seperti redistribusi masuk wilayah pantai tertentu diatur besarannya sehingga dirasakan keadilannya oleh para wisatawan dan masyarakat setempat. Para aparaturnya juga menegakkan aturan ini dengan baik. Maka kesinambungan jumlah pendatang yang ingin merasakan pantai atau kuliner tetap terjaga.

Masyarakat lokal dalam hal ini meliputi kelompok ibu-ibu, bapak-bapak dan pemuda menjadi salah satu komponen utama pendukung pariwisata berkelanjutan di mana para ibu apakah yang tergabung dalam kelompok PKK atau Sadar Wisata dapat terlibat dalam pemberdayaan keluarga seperti pembuatan kuliner khas desa atau kerajinan tangan yang bisa dipasarkan pada hari-hari tertentu di saat wisatawan banyak yang datang. Perekonomian desa akan menjadi lebih berjalan dan partisipasi kelompok ini akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun peningkatan kapasitasnya dapat berupa pelatihan keterampilan usaha kecil, pengembangan kapasitas kewirausahaan, dan kesadaran lingkungan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tujuan pariwisata dikembangkan dan dapat meningkatkan perekonomian lokal serta mendukung keberlanjutan pariwisata. Di sektor pariwisata, UMKM dapat berupa berbagai macam usaha selain kulineran dan kerajinan tangan, seperti penyediaan penginapan dan homestay di mana para wisatawan dapat merasakan pengalaman autentik akan suasana yang lebih personal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal.

Untuk para pemuda desa, mereka bisa menjadi pemandu wisata yang dapat membantu wisatawan dalam mengeksplorasi destinasi pariwisata secara lebih mendalam. Para pemandu wisata lokal memainkan peran yang sangat berarti karena dapat mengedukasi mengenai budaya, terkait sejarah, dan nilai-nilai lokal. Para pemuda ini kemudian bisa bergabung dengan para bapak dan ibu rumah tangga dalam kelompok Sadar Wisata. Kelompok ini menjadi wadah bagi anggota masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam mendukung dan mengembangkan potensi pariwisata karena

berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Fungsi dari kelompok ini selain mempromosikan pariwisata juga menjadi edukator bagi masyarakat sekitarnya. Karenanya peningkatan kapasitas kelompok ini lebih diarahkan pada keterampilan pemandu wisata, edukasi pariwisata berkelanjutan, dan pengelolaan atraksi lokal. Di sini pula para Duta Wisata bekerja bersama-sama dalam mempromosikan pariwisata lokal. Demikian pula dengan kelompok pemberdayaan dan promosi pariwisata menjadi bagian dari upaya gotong royong dan pembangunan fisik desa yang berkaitan dengan pariwisata. Mereka ini semua dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan pemberian pelatihan platform digital dan promosi pariwisata. Mereka dapat menjadi garda terdepan dalam pemasaran wisata secara digital melalui penggunaan platform online.

Bidang budaya, lembaga adat dan budaya lokal menjalankan fungsinya dalam melestarikan budaya. Nilai-nilai yang dianut dan diagungkan serta budaya dalam bentuk tarian, ritual dan sebagainya harus tetap terjaga. Karenanya pariwisata berkelanjutan berarti budaya lokal terjaga dan tidak tergerus atau tergantikan atas nama pariwisata. Otentifikasi menjadi aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan. Dalam rangka penjagaan ini pelatihan bagi komunitas budaya dapat dilakukan seperti pelatihan dokumentasi budaya dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan acara budaya lokal.

Stake holder swasta, dapat menyediakan transportasi lokal untuk wisatawan menikmati daerah wisata seperti menggunakan sepeda motor (ojek) atau mobil sehingga mobilitas wisatawan di sekitar pantai atau daerah wisata lainnya bisa berjalan dengan baik. Di sini selain memperluas daerah wisata, UMKM transportasi bisa mendukung kesejahteraan keluarga. Satu hal yang menarik dalam kelembagaan sosial pendukung pariwisata berkelanjutan adalah keterlibatan dari pihak pendidikan seperti peneliti dan pendidik dari perguruan tinggi. Pihak ini dapat membantu pihak-pihak sebelumnya dalam mengembangkan pariwisata melalui peran akademisnya seperti penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penelitian misalnya, pihak ini dapat meneliti perkembangan pariwisata sekaligus mengevaluasi pembangunan pariwisata di wilayah

tertentu. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan sehingga menjadi lebih baik dan mensejahterakan masyarakat.

8. Tahap Diskusi

Pada tahap diskusi ini point utama adalah penyamaan persepsi, mengidentifikasi peran para aktor pariwisata dan stake holder yang terlibat, guna mempermudah kegiatan selanjutnya. Berikut ini disajikan gambar diskusi yang dilakukan oleh para aktor-aktor pariwisata yang terlibat, dan termasuk para stake holder yang lain, adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Diskusi Para Aktor Pariwisata Pantai Grajagan



Diskusi tersebut di atas membahas tentang penguatan kelembagaan wisata pantai Grajagan, Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasa, dan

evaluasi. Dalam diskusi tersebut juga hadir perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi. Selain empat aspek tersebut di atas, diskusi juga memperkuat aspek koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, untuk memperkuat proses kelembagaan menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Penguatan kelembagaan desa wisata difokuskan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Grajagan, berlangsung selama satu hari dan berjalan dengan baik. Antusiasme peserta terlihat dalam setiap sesi terutama sesi tanya jawab di mana para pihak terkait saling mendukung dan bersedia membantu untuk lebih terlibat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Semua pihak yang terlibat pada dasarnya telah menjalankan perannya masing-masing seara baik, namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus ditingkatkan lagi, terutama dalam aspek kebersihan lingkungan. Isu mengenai lingkungan selalu menjadi pembahasan penting dalam kebijakan pengembangan wisata. Penguatan kelembagaan harus mempertimbangkan kelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat lokal, demi menjaga keberlangsungan wisata.

REKOMENDASI

Berdasarkan dari hasil pengabdian yang telah dilakukan, maka rekomendasi dalam pengabdian ini adalah Pemerintah Daerah Banyuwangi harus memberikan support yang lebih terhadap pengembangan wisata berkelanjutan, dan program pariwisata berkelanjutan ini harus dijadikan program prioritas atau program unggulan di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, F. F., Salahudin, S., & Nurjaman, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata lokal: Sebuah kajian pustaka terstruktur. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(4), 775–789.
- Arasy, M. A., Trisutomo, S., & Ekawati, S. A. (2019). Perencanaan Kawasan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Pantai Gusunga, Kabupaten Takalar). *Jurnal Wilayah & Kota Maritim ...*, 7(6).
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).
- Haryanto, J. T. (2019). Kesesuaian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata dan Permasalahan Pariwisata di Indonesia. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 25–36.
- Junaid, I. (2016). Analisis data kualitatif dalam penelitian pariwisata. *Jurnal Kepariwisata*, 10(1), 59–74.
- Muganda, M., Sirima, A., & Ezra, P. M. (2013). The role of local communities in tourism development: Grassroots perspectives from Tanzania. *Journal of Human Ecology*, 41(1), 53–66.
- Nugroho, I., Pramukanto, F. H., Negara, P. D., Purnomowati, W., & Wulandari, W. (2016). Promoting the rural development through the ecotourism activities in Indonesia. *American Journal of Tourism Management*, 5(1), 9–18.
- Nurhidayati, S. E. (2015). Studi evaluasi penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai pendukung agrowisata berkelanjutan. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(1), 1–10.
- Purnamasari, A. M. (2011). Pengembangan masyarakat untuk pariwisata di kampung wisata Toddobojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 22(1), 49–64.

-
- Putra, I., & Pitana, I. (2010). Pariwisata pro-rakyat: Meretas jalan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Ruslan, R. (2013). Strategi Pengembangan Wisata Bahari Kabupaten Takalar. Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 38–44.